

## Pembelajaran Bahasa Mandarin pada Masa Orde Baru

Miguel Angelo Jonathan<sup>1</sup>, Ayu Trihardini<sup>2</sup>, Hudyekti Prasetyaningtyas<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

[miguelangelojonathan@gmail.com](mailto:miguelangelojonathan@gmail.com), [ayu.trihardini@unj.ac.id](mailto:ayu.trihardini@unj.ac.id), [hudyekti@unj.ac.id](mailto:hudyekti@unj.ac.id)

**Abstrak:** Bahasa Mandarin telah menjadi salah satu bahasa asing yang diminati di Indonesia dan diajarkan dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia mengalami berbagai perkembangan kondisi pada setiap periode tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pembelajaran bahasa Mandarin pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Sumber data di antaranya adalah artikel koran, buku, serta dokumen lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, bahasa Mandarin pada khususnya dan kebudayaan Tionghoa pada umumnya mengalami pembatasan ketat. Hal ini berhubungan dengan kampanye anti komunisme dan kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut menyebabkan pembelajaran bahasa Mandarin pada masa tersebut sempat terhenti dan hanya dapat dipelajari secara terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada masa Orde Baru serta dampaknya terhadap pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada saat ini.

**Kata Kunci :** Pembelajaran bahasa Mandarin, perkembangan, kondisi, Orde Baru

**Abstract:** Mandarin Chinese language has become one of the most popular foreign languages in Indonesia and is taught from kindergarten to university level. Learning Mandarin in Indonesia experiences various developments in conditions at each certain period. This paper aims to describe the conditions of learning Mandarin in the New Order era. The research method used is a qualitative research method with a historical approach. In collecting data, researchers used the method of documentation. Data sources include newspaper articles, books, and other relevant documents. The results showed that in the New Order era, Mandarin in particular and Chinese culture in general experienced strict restrictions. This is related to the anti-communism campaign and the assimilation policy implemented by the New Order government against the ethnic Chinese community. This policy caused the learning of Mandarin at that time to be halted and could only be studied in a limited way. The results of this study are expected to describe the condition of learning Mandarin in Indonesia during the New Order era and its impact on learning Mandarin in Indonesia at this time.

**Keywords:** Chinese language teaching, developments, conditions, New Order Era

### PENDAHULUAN

Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa asing yang kini banyak diminati dan dipelajari di Indonesia. Saat ini, pembelajaran bahasa Mandarin diberikan secara formal di banyak sekolah negeri maupun swasta dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dan secara nonformal di tempat-tempat kursus.

Perkembangan bahasa Mandarin di Indonesia dari masa ke masa mengalami berbagai kondisi. Pada tulisan ini, penelitian dibatasi pada perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pembelajaran bahasa Mandarin

dalam masa yang relatif tidak singkat tersebut serta dampaknya terhadap pembelajaran bahasa Mandarin pasca-Orde Baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada masa Orde Baru serta dampaknya terhadap pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada saat ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah atau *historical research*. Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi melalui pembacaan artikel, jurnal, dan buku.

Pada penelitian ini peneliti hanya menganalisis data yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada masa Orde Baru. Hal-hal yang diteliti di antaranya adalah kebijakan pemerintah dan peristiwa sejarah di dalam dan luar negeri yang memengaruhi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran peneliti, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan-kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia. Pembelajaran bahasa Mandarin pada masa Orde Baru terdiri dari beberapa kondisi.

### **Pelarangan Penggunaan Bahasa Mandarin dan Penghentian Pembelajaran Bahasa Mandarin**

Kebijakan awal yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah pelarangan terhadap seluruh sekolah asing berbahasa Mandarin yang ada di Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 016/1966 Tentang Tindak Lanjut dari Penutupan Sekolah Asing. Pada saat itu, terdapat sekitar 600 sekolah berbahasa Mandarin dengan total murid Tionghoa Warga Negara Asing (WNA) hampir mencapai 300.000 siswa. Penutupan sekolah berbahasa Mandarin ini sejalan dengan kampanye anti komunisme yang diterapkan Orde Baru. Coppel (1994: 159) menyebutkan bahwa pemerintah Orde Baru menganggap sekolah berbahasa Mandarin dapat menjadi sumber penyusupan ideologi komunis. Dengan kebijakan menutup sekolah berbahasa Mandarin, maka pembelajaran bahasa Mandarin secara formal pada masa tersebut terhenti.

Selain menutup sekolah berbahasa Mandarin, pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin di Indonesia. Pelarangan surat kabar berbahasa Mandarin terutama disebabkan karena surat kabar tersebut dianggap sebagai alat subversi asing. Meski demikian, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXII/1966 tentang Pembinaan Pers masih diperbolehkan penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin di Indonesia, tetapi dikelola oleh pemerintah (Coppel, 1994: 162). Surat kabar yang diizinkan tersebut adalah "Harian Indonesia", yang sejak April 1966 menjadi satu-satunya koran berbahasa Mandarin yang terbit di Indonesia (Suryadinata, 1986: 168). Hal ini dilakukan untuk membantu kebijakan pemerintah dalam hal mendidik dan mengindoktrinasi masyarakat Tionghoa di Indonesia seputar kesadaran nasional. Selain itu, penerbitan "Harian Indonesia" juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia para pembacanya ("Koran Cina," 1978). Selama penerbitannya pada masa Orde Baru, setengah rubrik "Harian Indonesia" menggunakan bahasa Indonesia, sementara setengahnya lagi menggunakan bahasa Mandarin.

Kondisi politik saat itu berdampak pada keputusan Orde Baru untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Oktober 1967, yang

semakin membuat penggunaan bahasa Mandarin tidak populer. Suryadinata (1986: 168) menyatakan bahwa pada masa Orde Baru, menggunakan bahasa Mandarin secara terbuka dianggap tidak seyogianya. Di Pontianak misalnya, pemerintah mengadakan “Minggu bahasa Indonesia” dan mendesak masyarakat Tionghoa Pontianak untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bukan bahasa dialek dari negara asalnya.

Pelarangan penggunaan bahasa Mandarin juga disebabkan oleh kebijakan asimilasi terhadap masyarakat Tionghoa yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ini dicetuskan oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Coppel (1994: 92) mengatakan bahwa menurut kelompok asimilasi yang diwakili oleh LPKB, “... satu-satunya cara untuk memecahkan masalah minoritas di Indonesia adalah dengan mengusahakan lenyapnya golongan WNI keturunan Tionghoa sebagai suatu kelompok sosial budaya yang terpisah.” Pandangan ini ditentang oleh Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang berpendapat bahwa minoritas Tionghoa harus diperlakukan sama seperti suku-suku lain di kalangan bangsa Indonesia, sehingga anjuran bagi orang Tionghoa untuk menanggalkan kebudayaannya dianggap diskriminatif dan tidak dapat diterima. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno lebih menyambut pandangan integrasi daripada pandangan asimilasi untuk menyelesaikan masalah minoritas Tionghoa. Namun dengan jatuhnya Orde Lama, pandangan asimilasi lebih diterima oleh pemerintah Orde Baru.

Salah satu peristiwa yang menggambarkan kebijakan asimilasi terjadi pada 10 April 1972. Pada saat itu, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) meminta kepada Menteri Keagamaan agar dilakukan penerjemahan Al-Qur’an ke dalam bahasa Mandarin serta diterbitkan sebuah jurnal dakwah dalam bahasa Mandarin untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat Tionghoa. Permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Keagamaan saat itu, H. A. Mukti Ali, dengan pertimbangan bahwa proses asimilasi etnis Tionghoa harus dipercepat dengan meniadakan segala hal yang dapat meningkatkan eksklusivitas, yang dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Mandarin (Tan, 208: 81-82). Pada tahun yang sama, PITI dilarang untuk menggunakan kata “Tionghoa” dalam nama organisasinya. Hal ini menyebabkan pembubaran PITI yang tak lama kemudian berdiri kembali dengan nama baru yaitu Pembina Iman Tauhid Islam agar tetap memiliki akronim yang sama dengan PITI.

Selain itu, pemerintah juga berupaya membatasi pengaruh kebudayaan Tionghoa dengan melarang dipertunjukkannya iklan berkarakter Han dalam film berbahasa Mandarin serta merencanakan pembatasan terhadap film dari Hong Kong dan Taiwan. Bagaimanapun, film berbahasa Mandarin tetap banyak diimpor dan menguasai pasaran bioskop, sehingga pada akhirnya larangan terhadap film berbahasa Mandarin tidak dilakukan. Ong (2017: 8) mengatakan bahwa terdapat banyak modal yang terlibat dalam film-film tersebut sehingga pertimbangan ekonomi lebih penting dibandingkan usaha melakukan pembatasan terhadap pengaruh kebudayaan Tionghoa.

Selanjutnya, pada tahun 1978 dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina. Peraturan ini menekankan bahwa pelarangan tersebut dilakukan untuk memupuk dan mengembangkan kebudayaan Indonesia demi keutuhan dan kesatuan bangsa dan peningkatan pembangunan bahasa nasional. Dawis (2010: 110-111) menyebutkan bahwa segera setelah keputusan Menteri Perdagangan tersebut dikeluarkan, formulir pernyataan cukai yang diberikan kepada orang Indonesia yang kembali dari luar negeri maupun orang asing yang datang ke Indonesia memasukkan butir-butir sebagai berikut: “Apakah Anda membawa narkotika, obat keras, senjata api, senjata, amunisi, senapan laser, bahan porno, *barang cetakan dalam bahasa Cina*, obat-obatan Cina, pesawat

penerima, atau telpon nirkabel?” Adapun ancaman hukuman yang dikenakan bagi yang memiliki dan membawa barang cetakan berbahasa Mandarin masuk ke Indonesia sejajar dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang membawa narkoba maupun obat terlarang (Handoko, 2010: 361)

Peristiwa lainnya yang menunjukkan upaya pemerintah untuk mencegah berkembangnya kebudayaan Tionghoa dalam bentuk bahasa Mandarin di tengah masyarakat juga terjadi pada tahun 1987, ketika pemerintah mengharuskan senam *tai chi* dan *wai tan kung* yang sedang populer di masyarakat untuk diganti dengan nama Indonesia. *Tai chi* diganti menjadi Senam Tera Indonesia dan *wai tan kung* diubah menjadi Senam Sehat Indonesia. Tidak hanya itu, lagu pengiring kedua olahraga itu pun diharuskan menggunakan lagu Indonesia dan tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Mandarin (“Tai Chi,” 1987). Mengenai penggantian nama kedua olahraga tersebut, Abdul Gafur yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan: “Olahraganya sendiri kita kembangkan. Tapi kalau biarkan istilah asingnya masuk, bahasa Cinya berkembang, terang akan mengganggu pembinaan, khususnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.” Namun demikian, cabang olahraga lain yang menggunakan aba-aba dan nama asing selain bahasa Mandarin seperti *karate* dan *taekwondo* diperbolehkan.

### **Pembatasan Pembelajaran Bahasa Mandarin**

Dengan adanya kebijakan pelarangan penggunaan dan penampilan bahasa Mandarin di muka umum, pembelajaran bahasa Mandarin secara formal dari jenjang taman kanak-kanak hingga menengah ke atas di sekolah swasta maupun negeri terhenti. Meski demikian, pemerintah Orde Baru membuat beberapa pengecualian.

Pada rentang tahun 1969-1975, Orde Baru mengizinkan berdirinya suatu sekolah khusus bagi masyarakat Tionghoa bernama Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPC) yang mengadakan pembelajaran bahasa Mandarin. Menurut Coppel (1994: 310), pendirian SNPC merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk memperkuat hubungan dengan Taiwan dan orang pro-Kuomintang di Indonesia. Pendekatan kepada Taiwan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama akhir tahun 1960-an itu terutama dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan kestabilan politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suryadinata (1986: 165), pendirian SNPC merupakan salah satu konsesi yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru kepada masyarakat Tionghoa totok untuk memenangkan dukungan mereka dalam memantapkan situasi politik dan ekonomi di Indonesia.

SNPC tidak bertahan lama karena pada tahun 1974 diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 072/U/1974 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/1968 yang mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan SNPC. Berdasarkan keputusan tersebut, seluruh SNPC yang ada akan diubah menjadi sekolah nasional swasta biasa. SNPC yang bertujuan mempercepat proses asimilasi dianggap sudah tidak diperlukan, dan pemerintah berencana membuat peraturan baru yang menyangkut asimilasi (pembauran) masyarakat Tionghoa dalam bidang pendidikan (BAKIN, 1974: 344-346). Dengan penutupan seluruh SNPC pada tahun 1975, otomatis tidak ada lagi institusi pendidikan berupa sekolah yang memberikan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia.

Pada jenjang perguruan tinggi, terdapat dua universitas yang diperbolehkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengadakan pembelajaran bahasa Mandarin dalam Jurusan Cina (sekarang disebut Jurusan Sastra Cina), yaitu Universitas Indonesia (UI) yang terletak di Depok dan Universitas Darma Persada (Unsada) yang berlokasi di

Jakarta. UI dibiarkan sebagai satu-satunya universitas negeri yang memiliki Jurusan Cina oleh Orde Baru demi kepentingan pertahanan dan intelejen negara. Hal ini diungkapkan oleh Pattiradjawane dalam suatu seminar yang diadakan Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017, yang mengatakan bahwa jurusan Sastra Cina UI pada masa Orde Baru lebih diutamakan untuk tujuan intelejen. Aizawa (dalam Tsuda, 2010: 321) juga mengatakan bahwa selama pemerintahan Orde Baru, riset dan edukasi yang berhubungan dengan Tiongkok hanya dilakukan di Universitas Indonesia, yang banyak lulusannya kemudian menjadi birokrat dalam urusan dengan Tiongkok di Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN).

Sementara itu, Unsada menjadi satu-satunya universitas swasta yang diperbolehkan memiliki Jurusan Cina karena mendapatkan dukungan dari BAKIN. Hal ini terutama disebabkan Yayasan Melati Sakura yang mendirikan Unsada serta para staf dan pengajarnya, merupakan orang-orang yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, militer, dan BAKIN sendiri (Cholid, 1987). Berdasarkan penelusuran peneliti diketahui bahwa Yoga Soegomo, yang pada tahun 1987 Kepala BAKIN, dan Ginandjar Kanasasmita yang menjabat Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, merupakan anggota Yayasan Melati Sakura. Rektor Unsada adalah Dr. Sjarif Thajeb, mantan Rektor UI dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa pengajar Unsada merupakan dosen di Jurusan Cina UI serta dari Lemhanas. Sedangkan dekan Fakultas Sastra Unsada adalah W.D. Sukisman, pernah mengajar di UI, Akabri, dan Sesko ABRI, bekas konsul jenderal RI di Hong Kong, serta pernah bertugas sebagai staf atase militer KBRI di Beijing (1955-1959). W.D. Sukisman juga merupakan ketua Badan Kontak Urusan Tjina (BKUT) dan sekretaris Staf Khusus Urusan Tjina (SCUT), dua badan yang didirikan oleh Orde Baru pada akhir tahun 1960-an untuk mengurus masalah asimilasi etnis Tionghoa.

Berdasarkan paparan di atas, maka kondisi pembelajaran bahasa Mandarin pada masa Orde Baru seperti yang diungkapkan oleh Handoko (2010: 360), yaitu bahwa masa pemerintahan Orde Baru dapat disebut sebagai masa vakumnya bahasa Mandarin di muka umum. Meski demikian, berbagai peraturan yang membatasi penggunaan dan pembelajaran bahasa Mandarin tidak membuat bahasa tersebut sepenuhnya hilang di Indonesia. Bahasa Mandarin masih digunakan dalam percakapan di lingkungan keluarga Tionghoa yang mengirim anak-anak mereka bersekolah di sekolah berbahasa Mandarin sebelum tahun 1965. Pelestarian bahasa Mandarin di lingkungan keluarga juga dapat terwujud karena ada orang tua anggota masyarakat Tionghoa yang mampu membayar guru untuk mengajarkan bahasa Mandarin kepada anak-anak mereka atau mengirim anak-anak mereka ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura untuk mempelajari bahasa Mandarin (Dawis, 2010: 29). Tsai (2010) menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Mandarin pada masa pemerintahan Orde Baru harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menjadi suatu kegiatan yang harus dirahasiakan. Berdasarkan penuturan seorang pemilik perusahaan di Jawa yang Tsai temui, ketika akan memulai pembelajaran bahasa Mandarin yang dilakukan dengan guru privat, mereka harus “menutup semua pintu dan jendela [rumah] kami. Dan ketika kami melihat seseorang dari tentara di luar, kami harus segera menyembunyikan buku [pelajaran bahasa Mandarin] kami.”

Adapun kesulitan dalam mempelajari bahasa Mandarin pada masa Orde Baru juga diceritakan dalam novel sejarah yang ditulis oleh Soe Tjen Marching, *Dari dalam Kubur* (2020: 411). Salah satu tokoh utama novel tersebut, Djing Fei, membuka kursus bahasa Mandarin di rumahnya dan pada suatu hari didatangi oleh dua orang polisi yang menemukan brosur kursus miliknya:

“Ini brosur ibu?”

Saya mengangguk.  
'Ibu tahu bahwa bahasa Mandarin dilarang?'  
Saya melirik pada ketiga murid saya.  
'Murid ibu, ya?' Salah seorang polisi yang lebih gemuk itu mendekati mereka dengan lagak jagoan. 'Sudah pintar *cang-cing-cong?*' tanyanya pada mereka dengan suara keras. Ketiga murid itu hanya bisa melongo.  
[...]  
Kedua lelaki itu duduk tanpa diminta. 'Ibu tahu kalau sudah melanggar hukum?'  
Saya tidak bisa berkata apa pun.  
'Ibu tahu tidak, kalau tulisan Cina sudah dilarang.'  
Saya diam saja.  
'Tidak boleh! Dilarang! Jelas?'"

Tan (2008: 26) mengatakan bahwa kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Orde Baru selama lebih dari tiga puluh tahun pada akhirnya mengurangi jumlah etnis Tionghoa yang lancar berbahasa Mandarin, terutama di generasi yang lebih muda. Selain itu, berkurangnya jumlah etnis Tionghoa yang mampu berbicara bahasa Mandarin tidak terlepas oleh fakta bahwa bahasa tersebut bukan merupakan bahasa ibu (*mother tongue*) dari masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Sehingga meskipun sebelum Orde Baru pembelajaran bahasa Mandarin tersebar luas, bagi masyarakat Tionghoa bahasa Mandarin tetaplah sebuah bahasa yang untuk dikuasainya harus melalui proses belajar. Oleh karena itu, ketika Orde Baru menutup seluruh sekolah berbahasa Mandarin dan melakukan pembatasan terhadap bahasa tersebut, secara sistematis generasi etnis Tionghoa yang lebih muda kehilangan kesempatan untuk mempelajari bahasa Mandarin. Tsuda (2010: 319) menyebutkan bahwa selama dan sesudah masa Orde Baru hanya terdapat sejumlah kecil anggota masyarakat etnis Tionghoa yang masih dapat menggunakan bahasa Mandarin sebagai sarana komunikasi, terutama generasi tua yang telah cukup mempelajarinya di sekolah, atau mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

### **Pelonggaran Pembatasan Pembelajaran Bahasa Mandarin Pada Tahun 1990-an**

Sejak pemerintah Orde Baru menutup seluruh SNPC pada tahun 1975, pembelajaran bahasa Mandarin dari jenjang taman kanak-kanak hingga menengah ke atas tidak dapat diajarkan lagi secara bebas. Secara formal, hanya UI dan Unsada yang diperbolehkan pemerintah untuk memberikan pelajaran bahasa Mandarin dalam Jurusan Cina. Sementara kursus-kursus bahasa Mandarin hanya dapat diberikan secara sembunyi-sembunyi. Memasuki pertengahan tahun 1990, keadaan ini perlahan berubah ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan "pencairan" hubungan diplomatik dengan RRT yang sempat dibekukan sejak tahun 1967. Keputusan pemerintah Indonesia untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan RRT terutama berhubungan dengan kepentingan ekonomi kedua negara (Ku, 2002).

Sejak RRT mengganti kebijakan ekonominya menjadi lebih terbuka, perekonomian RRT terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia melihat adanya potensi besar untuk meningkatkan laju perekonomian dalam negeri melalui hubungan dagang dengan RRT, dan begitu pula sebaliknya dengan RRT. Dengan demikian, pencairan kembali hubungan diplomatik dipandang oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara memperlancar hubungan ekonomi kedua negara.

Pencairan kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT setelah dua puluh tiga tahun dibekukan memberikan angin segar pada kemungkinan diizinkannya pembelajaran bahasa Mandarin oleh pemerintah Orde Baru. Selain itu, pencairan

diplomasi kedua negara juga memberikan berbagai prospek pekerjaan baru yang membutuhkan tenaga ahli yang menguasai bahasa Mandarin, yang membuat adanya kebutuhan pendirian lebih banyak tempat pembelajaran bahasa Mandarin, selain di UI dan Unsada.

Pemerintah Orde Baru pada akhirnya melonggarkan kebijakan pembatasan pembelajaran bahasa Mandarin. Meskipun demikian, pembelajaran bahasa Mandarin pada tahun 1990-an tetap tidak diziinkan secara luas. Pemerintah Orde Baru hanya mengizinkan pembelajaran bahasa Mandarin dalam “skala kecil” sambil tetap memberlakukan pembatasan terhadap bahasa tersebut di satu sisi yang lain. Perizinan kembali pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada tahun 1990-an sarat akan kepentingan ekonomi, terutama berhubungan dengan peningkatan bidang pariwisata (Xiao, 1996: 324). Pada tahun 1994, Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pembelajaran bahasa Mandarin di lembaga-lembaga pariwisata dan mengeluarkan brosur-brosur hotel dalam bahasa Mandarin untuk menyiapkan diri menyambut turis-turis dari Tiongkok dan Taiwan yang meningkat (Tsuda, 2010; “Rakor Polkam,” 1994). Bagaimanapun, dalam bidang-bidang lain, bahasa Mandarin masih tetap dibatasi dan pembelajarannya hanya diizinkan secara terbatas.

Berdasarkan penuturan Tsuda (2010: 320), pada tahun 1990-an pemerintah Orde Baru memberikan toleransi terhadap sekolah swasta yang mulai mengadakan pembelajaran bahasa Mandarin. Selain mulai dilaksanakannya pembelajaran bahasa Mandarin di sekolah swasta, pada kurun waktu 1990-an juga terjadi peningkatan jumlah lembaga kursus bahasa Mandarin. Peneliti tidak berhasil mendapatkan jumlah sekolah swasta di Jakarta yang mulai memberikan pelajaran bahasa Mandarin ataupun jumlah kursus bahasa Mandarin yang berdiri setelah pencairan hubungan diplomatik, tetapi yang dapat dipastikan adalah pembelajaran bahasa Mandarin tetap tidak diberikan di sekolah-sekolah negeri.

Walaupun pemerintah Orde Baru mulai melonggarkan pembatasan terhadap pembelajaran bahasa Mandarin, bukan berarti bahasa Mandarin dapat digunakan atau ditampilkan dengan bebas di muka umum. Pada November 1991 misalnya, pemerintah masih tetap melakukan pelarangan terhadap lagu-lagu berbahasa Mandarin di tempat karaoke (“Dilarang,” 1991). Bahasa Mandarin baru dapat digunakan dan dipelajari secara bebas setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, terutama pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang membatasi penampilan kebudayaan Tionghoa di muka umum.

### **Dampak Pembatasan Terhadap Pembelajaran Bahasa Mandarin Pasca-Orde Baru**

Meskipun telah lebih dari dua puluh tahun semenjak Orde Baru berakhir dan pembelajaran bahasa Mandarin kini dapat dilakukan secara luas, kebijakan Orde Baru yang membatasi kebudayaan Tionghoa serta pembelajaran bahasa Mandarin masih berdampak hingga saat ini. Berkenaan dengan kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Orde Baru, kebijakan asimilasi yang mengekang segala bentuk kebudayaan Tionghoa justru semakin memperlebar jurang di antara masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa. Kondisi ini terlihat misalnya dalam *Indonesia National Survey Project* (INSP) yang diterbitkan pada bulan September 2017 oleh Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) – Yusof Ishak Institute di Singapura untuk menjelaskan keadaan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia menganggap adat istiadat Tionghoa tidak cocok dengan nilai-nilai Indonesia, sekaligus menyatakan ketidaknyamanan terhadap pemimpin beretnis Tionghoa. Survei tersebut

juga menunjukkan adanya anggapan bahwa orang Indonesia Tionghoa masih menguasai perekonomian dan memiliki loyalitas terhadap Tiongkok (Fossati, Hui, dan Negara, 2017: 24-28).

Selain itu, akibat pembatasan ketat terhadap bahasa Mandarin yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terkait kampanye anti komunisme, saat ini masih terdapat sensitivitas di kalangan masyarakat berkenaan dengan penggunaan dan pembelajaran bahasa Mandarin. Hal ini terlihat ketika mencuatnya reaksi negatif masyarakat umum terhadap usulan Menteri Agama Fachrul Razi pada Maret 2020 yang mengharapkan agar para siswa Madrasah Aliyah di Indonesia mampu menguasai bahasa Mandarin untuk meningkatkan daya saing lulusan sekolah (“Menag Ingin Lulusan Madrasah”, 2020). Dalam sebuah video Youtube yang memberitakan usulan Menteri Agama tersebut, banyak pihak yang menyuarakan ketidaksetujuan. Mereka menganggap usulan tersebut sebagai usaha “Cinanisasi” dan penyusupan komunisme di Indonesia.

Karena posisi masyarakat Tionghoa yang masih belum stabil di Indonesia, kebanyakan masyarakat Tionghoa melihat perkembangan bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa di Indonesia kontemporer dengan hati-hati. Hoon dan Kunjtara (2019: 594) mengibaratkan keadaan ini sesuai dengan idiom Tionghoa yang sering dikutip generasi tua masyarakat Tionghoa, yaitu “*ju’ansiwei*” (居安思危) yang berarti “tetap waspada bahkan di masa damai.” Hoon dan Kunjtara juga mengatakan bahwa tantangan dan permasalahan yang berada di luar lingkup pembelajaran bahasa Mandarin hanya dapat diselesaikan melalui harapan bahwa penguasaan bahasa Mandarin oleh orang Indonesia non-Tionghoa dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya, membantu menjembatani kesenjangan budaya, memerangi prasangka rasial, dan menghilangkan prasangka stereotipe.

Hal utama yang dapat menjamin perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada saat ini adalah posisi RRT sebagai kekuatan ekonomi dunia. Ketika perekonomian RRT mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru segera mencairkan kembali hubungan diplomatik yang sebelumnya dibekukan dan melonggarkan pembatasan bahasa Mandarin. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya posisi RRT di kancah dunia internasional terhadap perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pembelajaran bahasa Mandarin pada masa Orde Baru terdiri dari beberapa kondisi, di antaranya adalah (1) dilarang untuk dipelajari, (2) diperbolehkan namun dengan pembatasan, dan (3) pelonggaran pembatasan. Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia.

Adapun penyebab utama dari pembatasan bahasa Mandarin yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu kampanye anti komunis dan penerapan kebijakan asimilasi terhadap masyarakat Tionghoa. Pemerintah Orde Baru yang melakukan kampanye anti komunisme memandang bahasa Mandarin sebagai salah satu alat subversi asing dan ideologi komunis. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat Tionghoa membuat bahasa Mandarin tidak dapat digunakan dan dipelajari dengan bebas, sehingga bahasa Mandarin hanya dapat digunakan dan dipelajari secara terbatas, terutama di lingkungan keluarga.

Meskipun telah lebih dari dua puluh tahun semenjak Orde Baru berakhir dan pembelajaran bahasa Mandarin kini dapat dilakukan secara luas, kebijakan Orde Baru yang membatasi kebudayaan Tionghoa serta pembelajaran bahasa Mandarin masih

berdampak hingga saat ini. Dampak tersebut antara lain terkait kampanye anti komunisme, sehingga saat ini masih terdapat sensitivitas di kalangan masyarakat berkenaan dengan penggunaan dan pembelajaran bahasa Mandarin. Namun demikian, perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan terjamin. Hal ini sangat terkait dengan posisi RRT sebagai kekuatan ekonomi dunia. Sebagai instrumen penting dalam membangun hubungan dengan RRT, pembelajaran bahasa Mandarin tentu tidak akan diabaikan begitu saja oleh pemerintah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAKIN. 1979. *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia Buku 1*. Jakarta.
- Cholid, Mohamad. 1987, 4 Juli. *Jurus Cina di Semanggi*. *Tempo*.  
<https://majalah.tempo.co/read/pendidikan/31723/jurus-cina-di-semanggi>
- Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dawis, Aimee. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dilarang, Penyajian Lagu Mandarin di Karaoke. 1991, 21 November. *Kompas*, 7.
- Fakta atau Hoaks: Benarkah Menag Minta Bahasa Mandarin Jadi Syarat Lulus Madrasah Aliyah?. 2020, 10 Januari. *Tempo*. <https://cekfakta.tempo.co/fakta/551/fakta-atau-hoaks-benarkah-menag-minta-bahasa-mandarin-jadi-syarat-lulus-madrasah-aliyah>
- Fossati, D., Hui, Y.F., dan Negara, S.D. 2017. *Trends in Southeast Asia 2017 No. 10: The Indonesia National Survey Project: Economy, Society and Politics*. Dari [https://www.researchgate.net/publication/319610359\\_The\\_Indonesia\\_National\\_Survey\\_Project\\_Economy\\_society\\_and\\_politics](https://www.researchgate.net/publication/319610359_The_Indonesia_National_Survey_Project_Economy_society_and_politics)
- Handoko, Fransisca. 2010. Perjalanan Bahasa Mandarin dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Dalam Moriyama Mikihiro dan Manike Budiman (Ed.), *Geliat Bahasa Selaras Zaman* Jakarta: KPG. 355-371.
- Hoon, Chang-Yau dan Kuntjara, Esther. 2019. The Politics of Mandarin Fever in Contemporary Indonesia. *Asian Survey*, 59(3), 573-594.  
<https://doi.org/10.1525/as.2019.59.3.573>
- Koran Cina untuk Seluruh Indonesia. 1978, 22 Juli. *Tempo*, 36.
- Ku, Samuel C. Y. 2002. Indonesia's Relations with China and Taiwan: From Politics to Economics. *Asian Perspective*, 26 (4), 227-256. Dari <https://www.jstor.org/stable/42704392>
- Menag Ingin Lulusan Madrasah Aliyah Bisa Berbahasa Mandarin. 2020, 7 Januari. *CNN Indonesia*. Dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200107155758-20-463167/menag-ingin-lulusan-madrasah-aliyah-bisa-berbahasa-mandarin>
- Ong, Hok Ham. 2017. *Migrasi Cina, Kapitalisme Cina dan Anti Cina*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Rakor Polkam: Hotel-hotel Boleh Cetak Brosur Berhuruf Cina. 1994, 3 Agustus. *Kompas*, 1.
- Sai, Siew-Min dan Hoon, Chang-Yau. (Ed.). 2013. *Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion, and Belonging*. New York: Routledge.
- Soe, Tjen Marching. 2020. *Dari dalam Kubur*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Suryadinata, Leo. 1986. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press.
- Suryadinata, Leo. 1985. Government Policies towards the Ethnic Chinese: A Comparison between Indonesia and Malaysia. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 13(2), 15-28. Dari <https://www.jstor.org/stable/24490869?seq=1>

- “Tai Chi” dan “Wai Tan Kung” Ganti Nama. 22 Januari 1987. *Kompas*, 1.
- Tan, Mely G. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tsai, Michelle. 2010, 20 Mei. Indonesia Learns Chinese. Dari <https://foreignpolicy.com/2010/05/20/indonesia-learns-chinese/>
- Tsuda, Koji. 2010. Etnis Tionghoa yang Belajar Bahasa Mandarin: Pencarian ‘Kecinaan’-nya?. Dalam Moriyama Mikihiro dan Manike Budiman (Ed.), *Geliat Bahasa Selaras Zaman* (hlm 306-354). Jakarta: KPG.
- TvOneNews. (2020, 9 Januari). *Menag Fachrul Razi Ajukan Bahasa Mandarin Untuk Syarat Lulus Madrasah Aliyah?*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=JBGqCfzYmT0>
- Xiao, Pin. 1996. 浅谈印度尼西亚的华文教育. Dalam Zhuang Shanyu (Ed.), 《东南亚地区华文教育文集》. 320-326. Dari <https://repository.maranatha.edu/6388/>
- Zhou, Taomo. 2019. *Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Jakarta: Kompas.